

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LPPD merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 003 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Penyusunan LPPD ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga LPPD ini telah menggambarkan pelaksanaan penyelenggaran pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024.

Liwa, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat



MIA MIRANDA, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19720905 200212 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tupoksi SKPD.....	2
C. Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana.....	2
BAB II URUSAN KONKRUEN.....	4
1. Ringkasan Urusan (Pelaksana Urusan Wajib/Urusan Pilihan/Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah.....	4
2. Program dan Kegiatan	4
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	8
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim	19
5. Permasalahan dan Solusi.....	20
BAB III TUGAS PEMBANTUAN.....	21
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	21
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	21
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	21
4. Program, Kegiatan, Keluaran dan Rincian Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	21
5. Target Program dan Kegiatan.....	21
6. Alokasi Anggaran Kegiatan, Realisasi Kegiatan dan Realisasi Capaian Kegiatan.....	21
7. Permasalahan dan Kendala.....	21
8. Saran dan Tindak Lanjut.....	21
BAB IV KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS).....	22
1. Mitra yang Diajak Kerjasama.....	22
2. Dasar Hukum dan Bidang Kerja Sama.....	22
3. Nama Kegiatan.....	22
4. Jangka Waktu Kerja Sama.....	22
5. Lampiran Fotocopy Dokumen Kerja Sama.....	22
BAB V STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
1. Jenis Pelayanan Dasar SPM.....	23

2. Realisasi SPM.....	23
3. Alokasi Anggaran SPM.....	24
4. Dukungan Personil.....	25
PENUTUP.....	26

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Data Pendukung LPPD Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari jabatan eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang memiliki kewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintah serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik.

B. Tupoksi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

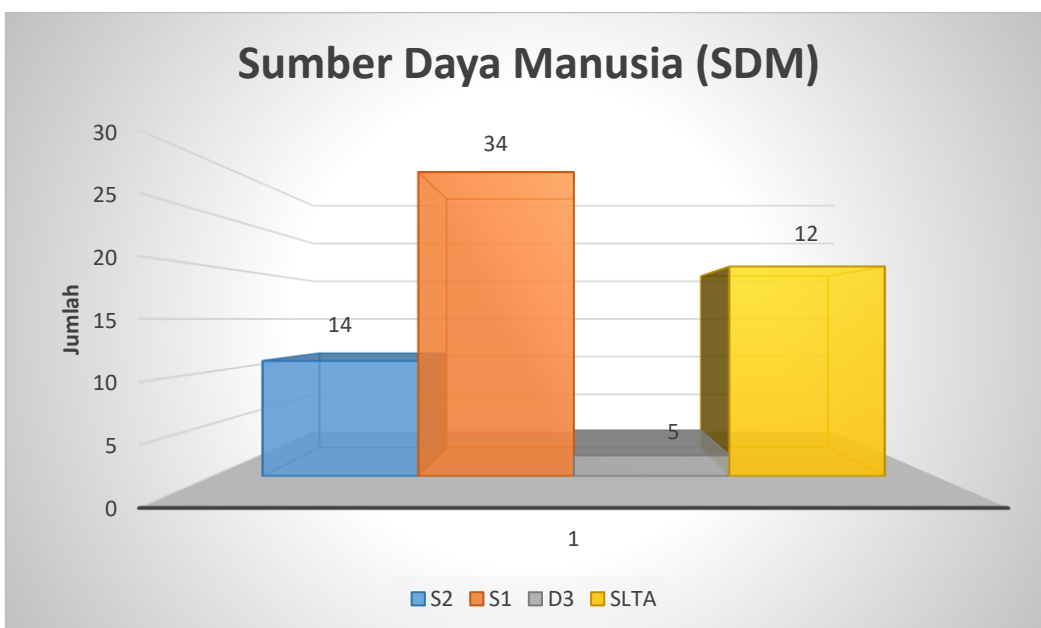
- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	14
2	S1	34
3	D3	5
4	SLTA sederajat	12

Grafik Sumber Daya Manusia



Sarana dan Prasarana

Prasarana terdiri dari :

- a. Bangunan kantor : 1 unit
- b. Bangunan workshop : 1 unit

Sarana terdiri dari :

- a. Kendaraan roda 4 : 7 unit
- b. Kendaraan roda 2 : 3 unit
- c. Kendaraan roda 3 : 1 unit
- d. Alat berat
 - Excavator : 2 unit
- e. Komputer : 12 unit

BAB II

URUSAN KONKRUEAN

1. Ringkasan Urusan Wajib

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 13 (tiga belas) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan, Jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan.

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.6.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Jalan
 - 2.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 2.1.2 Survei Kondisi Jalan/Jembatan
 - 2.1.3 Pembangunan Jalan
 - 2.1.4 Rekonstruksi Jalan
 - 2.1.5 Rehabilitasi Jalan
 - 2.1.6 Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 2.1.7 Pemeliharaan Rutin Jalan

2.1.8 Pembangunan Jembatan

2.1.9 Rehabilitasi Jembatan

B. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

1. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.1.2 Normalisasi/Restorasi Sungai

1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

1.2.2 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

1.2.3 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

1.2.4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

1.2.5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

C. Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

1.1.2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

3. Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

4. Program Pengembangan Permukiman

4.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 5.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 5.1.1 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.2 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG
- D. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW
 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 1.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- E. Sasaran Strategis Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah
 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 1.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - 2.1 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - 2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - 2.2.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sudah cukup. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 54.744.096.416,- terealisasi sebesar Rp. 53.945.351.906,- atau 98,54%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dengan alokasi dan realisasi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp34.250.000 dengan capaian sub kegiatan 11 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp34.193.650 atau 99,6%
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, jumlah anggaran Rp.9.432.000 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp9.432.000 atau 100%
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, jumlah anggaran Rp6.525.000 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.525.000 atau 100%
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, jumlah anggaran Rp6.375.000 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.375.000 atau 100,00
 - 1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, jumlah anggaran Rp6.551.000 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.491.000 atau 99,92%
 - 1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah anggaran Rp6.471.000, dengan capaian sub kegiatan 1 Laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.465.800 atau 99,92%
 - 1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp11.750.000 dengan capaian sub kegiatan 12 Laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp11.749.800 atau 100,00%
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah anggaran Rp5.771.663.861 dengan capaian sub kegiatan 63

Orang/bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp5.451.476.148 atau 94,45%

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, jumlah anggaran Rp6.245.000, dengan capaian sub kegiatan 1 laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.245.000 atau 100%

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, jumlah anggaran Rp8.575.000 dengan capaian sub kegiatan 4 Laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp8.550.000 atau 99,71%

1.2.4 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, jumlah anggaran Rp10.300.000, dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp10.300.000 atau 100,00%

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, jumlah anggaran Rp16.245.000, dengan capaian sub kegiatan 6 Dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp16.226.000 atau 99,88%

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran Rp5.980.000 dengan capaian sub kegiatan 4 paket. Realisasi kegiatan sebesar Rp5.980.000 atau 100%

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah anggaran Rp33.010.000 dengan capaian sub kegiatan 8 paket. Realisasi kegiatan sebesar Rp33.010.000 atau 100,00%

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah anggaran Rp9.360.000 dengan capaian sub kegiatan 4 Dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp9.300.000 atau 99,36%

1.4.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, jumlah anggaran Rp9.715.000 dengan capaian sub kegiatan 12 Laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp9.715.000 atau 100,00%

- 1.4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah anggaran Rp57.570.000 dengan capaian sub kegiatan 12 Laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp57.453.500 atau 99,66%
- 1.5 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, jumlah anggaran Rp.9.900.000 dengan capaian sub kegiatan 30 unit. Realisasi kegiatan sebesar 9.900.000 atau sebesar 100%.
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp.70.500.000 dengan capaian sub kegiatan 4 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp. 70.100.000 atau sebesar 99,43%.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah anggaran Rp5.120.000 dengan capaian sub kegiatan 240 laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp5.120.000 atau 100%
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah anggaran Rp42.800.000 dengan capaian sub kegiatan 12 laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp42.253.927, atau 98,72%
 - 1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah anggaran Rp60.438.000 dengan capaian sub kegiatan 12 laporan. Realisasi kegiatan sebesar Rp60.133.000 atau 99,50%
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah anggaran Rp121.050.000 dengan capaian sub kegiatan 12 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp114.999.651 atau 95%.
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, jumlah anggaran

Rp141.524.000 dengan capaian sub kegiatan 2 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp141.245.350 atau 99,80%

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp21.100.000 dengan capaian sub kegiatan 12 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp21.050.000 atau 99,94,00%

1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp49.011.920 dengan capaian sub kegiatan 1 Unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp48.965.000 atau 99,9%

1.7.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp584.686.919 dengan capaian sub kegiatan 4 Unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp578.681.766 atau 98,97 %

2. Program Penyelenggaraan Jalan

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, jumlah anggaran Rp.390.750.000 dengan capaian sub kegiatan 10 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp388.435.150 atau 99,41%

2.1.2 Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan, jumlah anggaran Rp623.996.800 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp621.017.331 atau 99,52%

2.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, jumlah anggaran Rp1.074.793.600, dengan capaian sub kegiatan 0,481 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.070501.000 atau 99,60%

2.1.4 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, jumlah anggaran Rp. 27.407.406.020.000 dengan capaian sub kegiatan 1,85 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp27.208.591.143 atau 99,27%

2.1.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, jumlah anggaran Rp3.132.345.600, dengan capaian sub kegiatan 1,617 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp3.117.445.500 atau 99,52%

2.1.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, jumlah anggaran Rp1.300.000.000, dengan capaian sub kegiatan 14,583 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.296.588.070 atau 99,74%

- 2.1.7 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, jumlah anggaran Rp2.419.200.000, dengan capaian sub kegiatan 1 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.409.918.000 atau 99,62%
- 2.1.8 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan, jumlah anggaran Rp288.000.000, dengan capaian sub kegiatan 1 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp287.037.000 atau 99,67%
3. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, jumlah anggaran Rp64.362.000 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp63.757.000 atau 99,06%
- 3.1.2 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai, jumlah anggaran Rp818.025.300 dengan capaian sub kegiatan 0,253 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp815.895.000 atau 99,74%
- 3.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, jumlah anggaran Rp115.171.000 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp114.268.000 atau 99,22%
- 3.2.2 Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp125.000.000 dengan capaian sub kegiatan 0,05 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp124.577.000 atau 99,66%
- 3.2.3 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa, jumlah anggaran Rp199.560.000 dengan capaian sub kegiatan 0,07 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp199.015.000 atau 99,73%

- 3.2.4 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp722.856.550 dengan capaian sub kegiatan 0,07 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp721.238.050 atau 99,73%
- 3.2.5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp704.751.000 dengan capaian sub kegiatan 1,496 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp702.215.000 atau 99,64%
- 3.2.6 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp739.337.400 dengan capaian sub kegiatan 4,32 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp736.899.400 atau 99,67%
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, jumlah anggaran Rp51.388.000 dengan capaian sub kegiatan 1 Dokumen. Realisasi anggaran sebesar Rp50.923.877 atau 99,10%
- 4.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan , jumlah anggaran Rp498.600.900 dengan capaian sub kegiatan 140 SR. Realisasi anggaran sebesar Rp495.604.800 atau 99,40%
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 5.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, jumlah anggaran Rp339.214.757 dengan capaian sub kegiatan 20 Rumah Tangga. Realisasi anggaran sebesar Rp336.899.600 atau 99,32%
6. Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 6.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, jumlah anggaran Rp500.750.000 dengan capaian sub kegiatan 283,755 M. Realisasi anggaran sebesar Rp496.780.780 atau 99,%

6.1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, jumlah anggaran 21.945.000 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi anggaran sebesar 24.

7. Program Penataan Bangunan Gedung

7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

7.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota jumlah anggaran Rp4.745.499.743 dengan capaian sub kegiatan 10 unit. Realisasi anggaran sebesar Rp4.723.855.350 atau 99,54%

7.1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG dengan anggaran Rp.147.858.600 dengan capaian sub kegiatan 5 dokumen. Realisasi anggaran sebesar Rp129.902.625 atau 87,86%.

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

8.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

8.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi. RDTR Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp214.957.000, dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp211.271.700 atau 98,29 %.

8.1.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang, jumlah anggaran

Rp111.820.000, dengan capaian sub kegiatan 100 orang .
 Realisasi kegiatan sebesar 80.890.400 atau 73,24 %.

9. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

9.1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

9.1.1 Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp101.430.000, dengan capaian sub kegiatan 2 Dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp101.013.958 atau 99,59%

10. Program Program Pengelolaan Tanah Kosong

10.1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

10.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp167.380.000 dengan capaian sub kegiatan 1000 Laporan. Realisasi anggaran sebesar Rp164.776.200 atau 98,44%

10.2 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

10.2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, jumlah anggaran Rp167.380.000 dengan capaian sub kegiatan 50 Laporan. Realisasi anggaran sebesar Rp167.220.550 atau 99,9%.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	14
2	S1	34
3	D3	5
4	SLTA sederajat	12
	JUMLAH	65

Jumlah pegawai berdasarkan golongan :

GOL.	a	b	c	d	JUMLAH
IV	5	1		-	6
III	17	3	10	11	48
II	-	-	8	7	11
I	-	-	-	-	
JUMLAH					65

Jumlah pejabat struktural

STRUKTURAL	JUMLAH
ESSELON II B (KEPALA DINAS)	
ESSELON III A (SEKRETARIS DINAS)	1
ESSELON III B (KEPALA BIDANG)	5
ESSELON IV A (KEPALA SEKSI & KASUBBAG)	2
ESSELON IV B KASUBBAG TU UPTD	1
JUMLAH	9

Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim

STRUKTURAL	JUMLAH
ESSELON II B (KEPALA DINAS)	
ESSELON III A (SEKRETARIS DINAS)	1
ESSELON III B (KEPALA BIDANG)	2
ESSELON IV A (KEPALA SEKSI & KASUBBAG)	
ESSELON IV B KASUBBAG TU UPTD	
JUMLAH	5

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Belum memadai jumlah sumber daya manusia terhadap beban kerja dinas.
- b. Jumlah alat berat dari sisi kualitas dan kuantitas masih kurang.

Penyelesaian masalah :

- a. Menambah jumlah sumber daya manusia.
- b. Menambah jumlah dan jenis alat berat

BAB III
TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tidak ada

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tidak ada

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tidak ada

4. Program, Kegiatan, Keluaran dan Rincian Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tidak ada

5. Target Program dan Kegiatan

Tidak ada

6. Alokasi Anggaran Kegiatan, Realisasi Kegiatan dan Realisasi Capaian Kegiatan

Tidak ada

7. Permasalahan dan Kendala

Tidak ada

8. Saran dan Tindak Lanjut

Tidak ada

BAB IV

KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

Tidak ada

2. Dasar Hukum dan Bidang Kerja Sama

Tidak ada

3. Nama Kegiatan

Tidak ada

4. Jangka Waktu Kerja Sama

Tidak ada

5. Lampiran Fotocopy Dokumen Kerja Sama

Tidak ada

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
- c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- d. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Realisasi SPM

Capaian realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai tahun 2024 adalah:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

Jumlah penduduk = 84.030 KK

Jumlah penduduk yang terlayani = 74.350 KK

$$SPM \text{ Pemenuhan Kebutuhan Air Pokok} = \frac{74.350}{84.030} \times 100\% = 88,48\%$$

- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Jumlah penduduk = 84.030 KK

Jumlah penduduk yang terlayani = 83.789 KK

$$SPM \text{ Pelayanan Air Limbah domestik} = \frac{83.789}{84.030} \times 100\% = 99,71\%$$

- c. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten.

Pada tahun 2024 tidak terdapat pemenuhan SPM tersebut dikarenakan tidak rumah yang terkena bencana alam.

- d. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten.

Pada tahun 2024 tidak terdapat pemenuhan SPM tersebut.

3. Alokasi Anggaran SPM

1. Alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebagai berikut:

Kegiatan Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota jumlah anggaran **Rp. 549.988.900,-**. Realisasi kegiatan sebesar **Rp. 546.528.677,-** atau **99,37 %**.

2. Alokasi anggaran penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota **Rp. 339.214.757,-** dengan capaian kegiatan tersedianya prasarana dan sarana sanitasi bagi masyarakat yang lokasinya tersebar di Kabupaten Lampung Barat. Realisasi kegiatan sebesar **Rp. 336.899.600,-** atau **99,32 %**.

3. Alokasi anggaran Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten sebagai berikut:

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota **Rp. 82.502.246,-** dengan realisasi **0,-** atau **0 %**.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk mencapai standar pelayanan dasar pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjumlah 23 orang.

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 hasil capaian sasaran kinerja yang ditetapkan telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah ditentukan melalui keterlibatan, dukungan aktif dan komitmen segenap komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai bagian dari sistem pembangunan infrastruktur.

Liwa, Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat



Mia Miranda, S.T.

Pembina Tingkat I

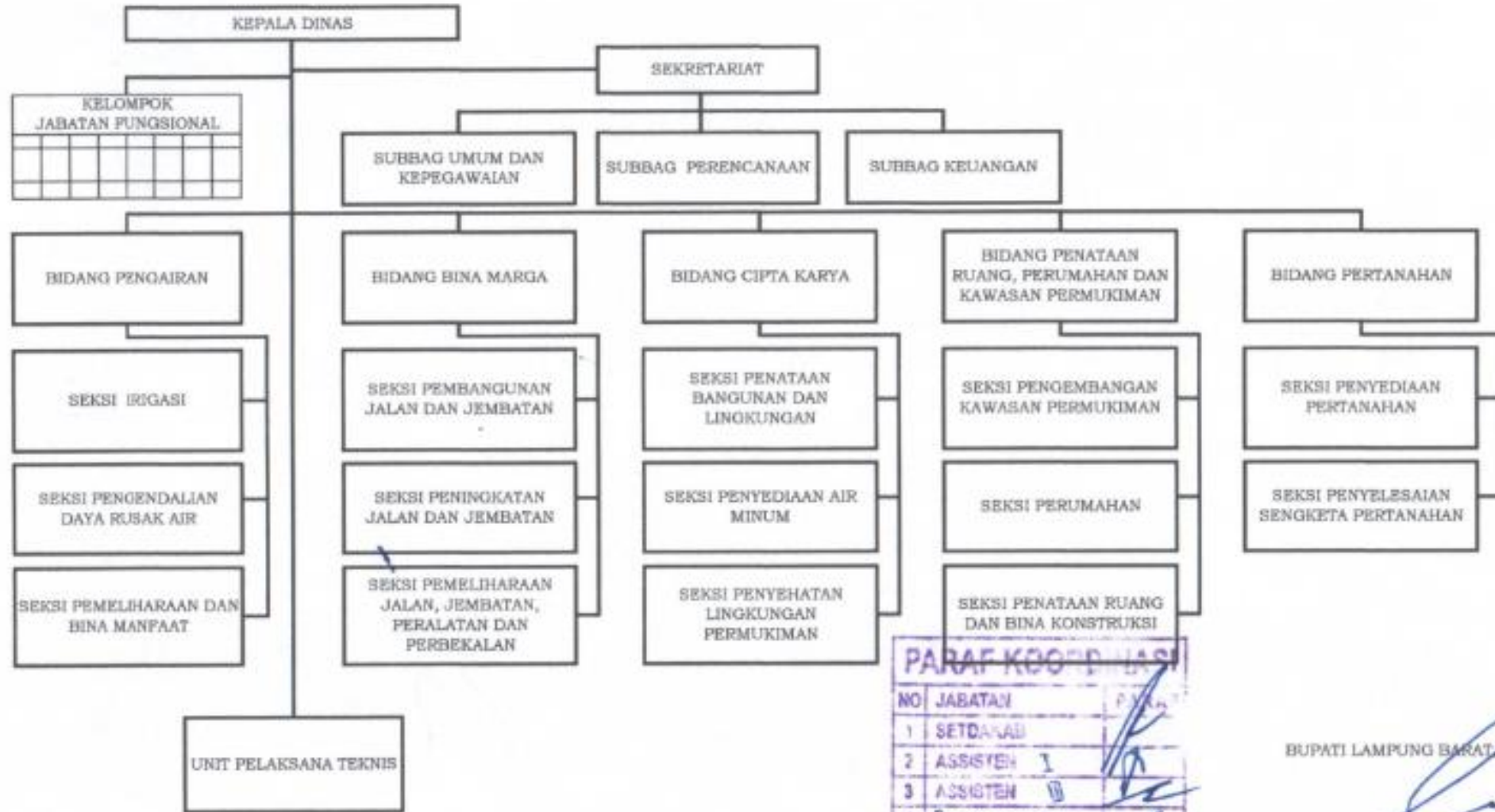
NIP. 19720905 200212 2 004

LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
- 2. Data Pendukung LPPD Tahun 2024**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 72 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 Des 2019



PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDA KAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	D. Organisasi
5	O. DUY PR

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS